



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional umum dan/atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 3

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Ketiga Fungsi

##### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bidang kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang budi daya dan penangkapan, pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;



- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;
- e. pembinaan terhadap UPT Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- g. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perikanan Budi Daya;
  - d. Bidang Perikanan Tangkap;
  - e. Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang, dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 1 Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta pengoordinasian tugas Bidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
  - d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- h. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha memiliki fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Dinas;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Dinas, serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Bidang Perikanan Budidaya

#### Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Budi Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perikanan budi daya.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budi Daya mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budi daya;
  - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan budi daya;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan budi daya;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perikanan budi daya;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perikanan budi daya;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

#### Pasal 10

Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 3

#### Bidang Perikanan Tangkap

#### Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;
  - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan tangkap;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perikanan tangkap;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perikanan tangkap;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perikanan tangkap;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## Pasal 12

Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

### Paragraf 4

## Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan

## Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian sumber daya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian sumber daya perikanan;
  - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian sumber daya perikanan;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian sumber daya perikanan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian sumber daya perikanan;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian sumber daya perikanan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengendalian sumber daya perikanan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

Susunan organisasi Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

### Paragraf 5

## UPT

## Pasal 15

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.





Paragraf 6  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

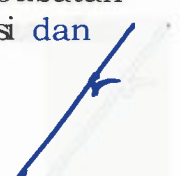
Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.





- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

### BAB III ESELONERING

#### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 31 Desember 2021

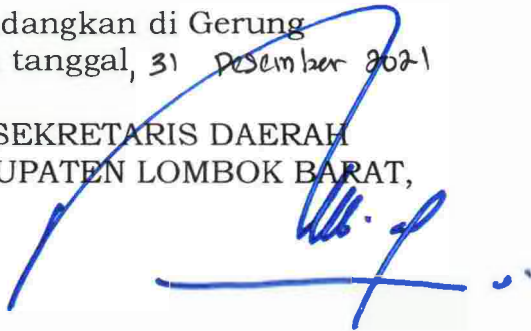
BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 31 Desember 2021

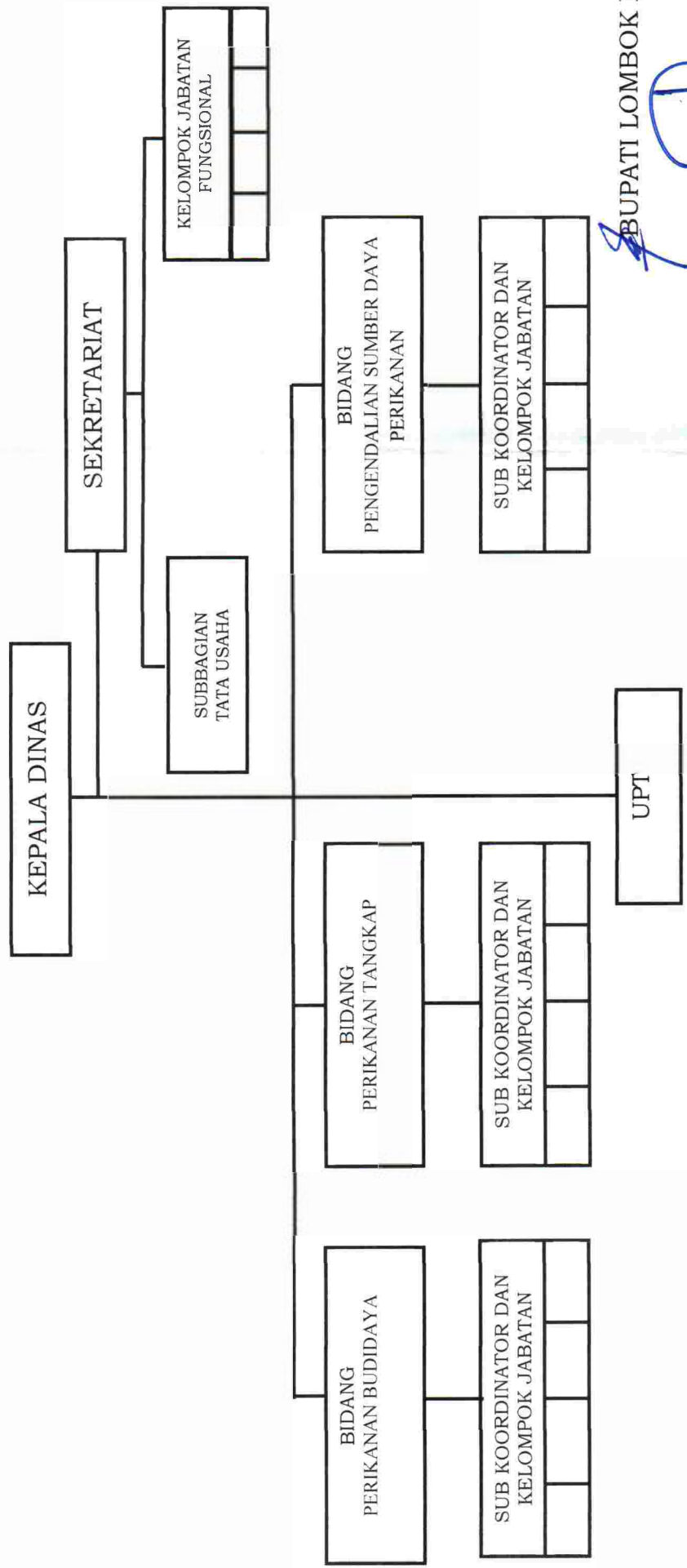
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,




H. BAEHAQI

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
 NOMOR 105 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
 LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
 H. FAUZAN KHALID